

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan satu masalah sosial besar dan serius yang sekian lama dihadapi bangsa Indonesia. Keberadaannya sudah lama menimbulkan keprihatinan serius pula. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang), penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang (misalnya *mark-up* dana proyek), pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan suap menyuap.¹ UU. No. 31 tahun 1999 pasal 2 JO UU. No 20 tahun 2001 menyatakan bahwa sebuah perbuatan bisa dikategorikan sebagai korupsi apabila memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan merugikan negara. Perbuatan melawan hukum dijabarkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif (kepatutan, kelaziman, serta norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat), dan hak orang lain.² *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menuliskan artikel tentang korupsi yang menyatakan bahwa hasil *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada lima tahun terakhir cenderung stagnan dengan skor CPI dari tahun 2015 hingga tahun 2018 berturut-turut adalah 36, 37,

¹ Agus Mulya Karsona, *Pengertian Korupsi*, dalam Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, *Op. cit*, hlm. 24-25.

² <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/perbuatan-melawan-hukum-penyalahgunaan-wewenang-dan-kerugian-negara> diunduh pada 21 Juni 2019 pk. 13.30 WIB

37, dan 38, jauh dari target pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 hingga 2019 yang menargetkan skor Indonesia mencapai angka 50.³ Menurut *Transparency International*, sebuah organisasi koalisi global yang bertujuan untuk melawan korupsi, pada tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat ke-89 dari 180 negara paling bersih dari korupsi. Dengan kata lain, Indonesia berada pada posisi negara ke-91 terkorup di dunia.⁴ Dilihat dari tren penindakan KPK selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2018 tampak kenaikan jumlah penetapan tersangka dan jumlah kasus yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut.⁵ Hal-hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Para pelaku korupsi diantara pejabat pemerintahan banyak didapati di kalangan kepala daerah. Penandatanganan pakta integritas yang menyatakan bahwa tidak akan korupsi ketika menjabat seperti hanya formalitas karena masih terjadi krisis kepemimpinan yang berintegritas di daerah. Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan para kepala daerah pun beragam, mulai dari penerimaan suap atau gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah.⁶

Dalam pantauan ICW ada beberapa faktor pendorong korupsi yang dilakukan para kepala daerah antara lain, besarnya kewenangan kepala daerah, tidak efektifnya fungsi pengawasan baik dari internal pemerintah daerah maupun

³ <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019> diunduh pada 13 Juni 2019 pk. 14.00 WIB

⁴ <https://www.transparency.org/cpi2018> diunduh pada 21 Juni 2019 pk. 12.30 WIB.

⁵ <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019> diunduh pada 13 Juni 2019 pk. 14.00 WIB

⁶ <https://antikorupsi.org/id/opini/tidak-jera-untuk-korupsi> diunduh pada 14 Juni 2019, pk. 15.50 WIB

parlemen daerah, beban biaya politik yang tinggi baik sebelum maupun setelah menjabat kepala daerah, dan hukuman yang ringan untuk koruptor.⁷ Menurut Reza A. A Wattimena penyebab korupsi adalah krisis kepercayaan dan kesenjangan ekonomi yang menjadikan korupsi sebagai kultur dan membentuk lingkaran setan. Sedangkan dari situasi manusiawi seorang manusia, korupsi dipandang sebagai ekspresi dari hasrat berkuasa, gemar berburu kenikmatan, dan sisi-sisi hewani lain yang brutal.⁸ Selain itu, korupsi juga dipandang sebagai bentuk dari kekosongan jiwa manusia dan ketidak pekaan kita akan kejahatan yang sistemik.⁹ Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa motif utama dari korupsi adalah kerakusan akan uang. Kerakusan akan uang ini berhubungan dengan moralitas. Praktik korupsi disebabkan pertama-tama karena kelemahan moral (sekitar 41,3 persen), tekanan ekonomi (23,8 persen), hambatan struktur administrasi (17,2 persen), dan hambatan struktur sosial (7,8 persen).¹⁰ Soenan Hadi juga menyebut lima dimensi yang mempengaruhi korupsi di Indonesia di mana moral termasuk di antaranya. Kelima hal itu adalah penegakan hukum, sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan moral keutamaan.¹¹

Maraknya korupsi di Indonesia sekian lama ini kiranya mencerminkan anggapan kebanyakan orang mengenai uang sebagai yang paling dikejar atau diinginkan dalam hidup mereka. Demi memperoleh kekayaan sebagai yang paling berharga atau bernilai orang-orang mau melakukan tindakan-tindakan yang buruk secara moral seperti korupsi itu. Kerakusan orang tidak hanya akan uang tetapi

⁷ *Ibid.*

⁸ Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti Korupsi*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 11-12.

⁹ *Ibid.* hlm. 26

¹⁰ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 30.

¹¹ Soenan Hadi, *Berani Korupsi Itu Memalukan*, Imania, Depok, 2013, hlm. 42.

juga pada jabatan politis yang memberikan kehormatan. Keduanya kerap bersama-sama dikejar atau menjadi motif tindakan-tindakan yang buruk secara moral seperti korupsi. Semakin kelihatan pada zaman sekarang uang atau kekayaan menjadi pengejawantahan kuasa ekonomis yang erat dengan kuasa politik sehingga besar kemungkinan untuk menjadi penguasa sebagaimana tampak pada praktik *money politics* dalam pemilu.¹² Kalau uang dan kehormatan dipandang sebagai tujuan terakhir dalam hidup, dapat dipertanyakan persoalan apa yang dapat muncul daripadanya? Tidakkah tampak bahwa orang melakukan tindakan-tindakan termasuk yang buruk secara etis ialah demi mencapai suatu tujuan terakhir yaitu uang atau kehormatan dengan segala efeknya merupakan suatu persoalan serius yang membuat perkara penjadian pengejaran akan uang dan kehormatan sebagai tujuan terakhir bukan perkara sepele.

Suatu tujuan begitu penting dalam moral. Tujuan hidup menjadi penuntun arah bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Dalam etika teleologis tujuan merupakan itu yang menjadi ukuran baik buruk tindakan. Apa yang menjadi tujuan tertinggi menentukan pilihan dan penilaian atas tindakan-tindakan.

Orang-orang Yunani Kuno memiliki etika yang meletakkan ukuran baik buruk menurut apa yang menjadi tujuan terakhir atau tertinggi seseorang. Etika semacam ini disebut etika teleologis. Kalau suatu tindakan sesuai dengan tujuan terakhir, maka tindakan itu baik secara moral, dan sebaliknya. Ada banyak klaim tentang apa yang seharusnya merupakan tujuan tertinggi manusia. Salah satu tokoh penting dalam etika Yunani Kuno, dan termasuk etika teleologis secara

¹² Bertens, K, *Perspektif Etika- Esai-esai Tentang Masalah Aktual*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 51-53

umum, adalah Aristoteles. Dalam etika dan sejarahnya Aristoteles juga memiliki kedudukan sangat terpandang dan pengaruh yang sangat besar. Aristoteles juga mendasarkan etikanya pada penilaian baik buruk tindakan menurut kesesuaiannya dengan tujuan terakhir. Ia menganut keyakinan berdasarkan fakta bahwa manusia dalam hidupnya bertindak atau beroperasi demi tujuan. Ini tampak pada apa yang ditunjukkan Aristoteles bahwa setiap keterampilan, penelitian, tindakan manusia tertuju kepada suatu tujuan, dan dari semua tujuan ada tujuan tertinggi atau terakhir yang tidak dicapai demi tujuan lain lagi (NE. I, 1).¹³ Dengan tujuan tertinggi yang dicapai, seseorang mencapai kepenuhannya. Aristoteles melihat pada zamannya uang dan kehormatan juga dianggap dan dijadikan oleh banyak orang sebagai tujuan tertinggi (NE. I, 5).¹⁴ Tentang ini Aristoteles juga mengungkapkan bahwa ia tidak setuju uang dan kehormatan dijadikan tujuan tertinggi seseorang. Pandangannya ini terungkap dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles juga merumuskan di sana apa yang menjadi tujuan hidup manusia yaitu *eudaimonia* atau kebahagiaan.

Penulis tertarik memperdalam pengertian mengenai arti tujuan terakhir menurut Aristoteles untuk mendapatkan wawasan mengenai tujuan terakhir apa yang seharusnya dipertimbangkan manusia dalam hidupnya agar mereka tidak jatuh pada ketanpasadaran atau keikut-ikutan menjadikan uang dan kehormatan sebagai tujuan terakhir. Kekeliruan atau kesalahan dalam menetapkan tujuan tertinggi seseorang memiliki efek serius dalam wilayah tindakan moral atau etika

¹³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics* (diterjemahkan oleh W. D. Ross), Batoche Books, Kitchener, 199, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6-7

seseorang. Demi mencapai tujuan tertinggi orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang memiliki persoalan moral. Kalau bagi Aristoteles uang dan kehormatan bukan tujuan tertinggi, dan menurutnya kebahagiaanlah yang merupakan tujuan tertinggi itu, maka pandangan Aristoteles ini menarik untuk dipahami lebih dalam.

1.2 Rumusan Masalah

Terhadap paham kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi menurut Aristoteles itu penulis melihat persoalan yaitu apa artinya kebahagiaan yang dimaksud oleh Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* dalam buku I dan X. Penulis ingin meneliti kedua buku ini karena ingin mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai apa itu konsep kebahagiaan menurut Aristoteles.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selain itu penulis juga ingin mempromosikan konsep kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi menurut Aristoteles

1.4 Metode Penulisan

Masalah dari skripsi dicoba dijawab dengan melakukan studi atas karya Aristoteles yang memuat kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi yaitu *Nicomachean*

Ethics khususnya buku I dan buku X. Dari sepuluh buku dalam *Nicomachean Ethics* dua buku inilah yang memuat perihal tujuan tertinggi dan kebahagiaan. Studi pustaka atas buku ini juga merujuk pada komentar ataupun bahan pustaka lain yang berhubungan dan membantu menyingkap makna kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi menurut Aristoteles.

1.5 Skema Penulisan

Hasil penelitian penulis diungkapkan dalam karya tulis ini dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang pemilihan tema, rumusan masalah, tujuan, metode, dan sistematika penulisan karya tulis ini.
- Bab II : Riwayat Hidup dan Karya Aristoteles
Pada bab ini penulis menghadirkan riwayat hidup dan juga sejarah perkembangan pemikiran Aristoteles. Di samping itu, penulis juga akan memaparkan gambaran umum *Nicomachean Ethics* mulai buku I sampai dengan buku X secara singkat.
- Bab III : Konsep Kebahagiaan Menurut Aristoteles
Di sini penulis menunjukkan hasil studi atas isi dari konsep kebahagiaan menurut Aristoteles.
- Bab IV : Tanggapan atas Gagasan Kebahagiaan Aristoteles
Dalam bab ini penulis akan menyampaikan tanggapan atas konsep kebahagiaan Aristoteles dengan menghubungkannya dengan paham

kebahagiaan menurut Plato dan Thomas Aquinas dan mengangkat sejumlah kritik terhadapnya.

- Bab V : Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari proses penelitian atas gagasan kebahagiaan menurut Aristoteles.